

JURNAL

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MENJAGA RAHASIA KLIEN

**(Studi di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan
Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa
Timur)**

ARTIKEL ILMIAH

**Guna Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

Oleh:

MAHARANI ROYA ANANTA

NIM. 105010103111010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Roya Ananta
NIM : 105010103111010
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/Pidana
Jenis Karya : Skripsi/Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MENJAGA RAHASIA KLIEN (Studi di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang

Pada Tanggal : 29 Januari 2014

Yang menyatakan,

Ttd.

(Maharani Roya Ananta)

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MENJAGA RAHASIA KLIEN

**(Studi Di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan
Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa
Timur)**

Maharani Roya Ananta, Sri Lestariningsih, Alfons Zakaria

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: oo_scarletdance@yahoo.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tentu menjadi konsekuensi bahwa masyarakat Indonesia tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Salah satunya adalah Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat (KEA) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UUA) terkait kewajiban Advokat dalam menjaga rahasia klien. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan kendala Advokat yang berkantor di Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners. Serta penanganan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran Kode Etik, yang hal ini adalah kewajiban menjaga rahasia klien. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada diolah secara deskriptif kualitatif. Advokat yang berbicara di depan publik terkait perkara yang ditangani belum pasti merupakan pelanggaran KEA. Terdapat kendala eksternal bagi Advokat dalam menjaga rahasia klien, yaitu terletak pada klien yang tidak bisa membatasi pembicaraan perkara terhadap pihak lain. Kemudian, DKD PERADI Jatim akan menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran KEA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Advokat, Rahasia Klien

Abstract

Indonesia is a country of law as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. This is certainly a consequence that the people of Indonesia are subject to and comply with applicable law. One is Article 4 of the Code Advocate h (KEA) and Article 19 of Law Number 18 Year 2003 About Advocate (UUA) related obligations in maintaining confidential client advocate. Therefore, the purpose of this study is to investigate and analyze the implementation and constraint-based Advocate Jonifianto & Partners and Lardi & Partners. And the

handling is done by the Regional Honor Board (DKD) PERADI East Java to Advocate violating the Code of Conduct, which it is the duty of client confidentiality. This study uses the approach that is used socio-juridical, including reviewing and analyzing issues that are legally defined by looking at the empirical facts objectively. Then, all the data that is processed by descriptive qualitative. Advocate public speaking related cases handled is a violation KEA uncertain. There is an external constraint for the Advocate in maintaining confidential client, which lies on the client that can not restrict speech case against the other party. DKD PERADI Java will handle complaints of alleged violations of KEA in accordance with applicable regulations.

Keywords: Advocate, Confidential Client

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum sudah merupakan tipe yang umum dimiliki bangsa-bangsa di dunia. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa juga tunduk kepada hukum tersebut.¹ Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum.²

Perkara yang terjadi di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum membuktikan bahwa memang penerapan dan penegakkan hukum masih dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini didukung dengan pendapat Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), yaitu Todung Mulya Lubis yang mengungkapkan bahwa hancurnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh Advokat. Bukan hanya disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa. Melainkan juga karena Advokat yang ada dalam lingkup mafia hukum.³ Seperti pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat yang saat ini sudah ada 43 (empat puluh tiga) perkara

¹ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2.

² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, 2007, Hal. 75

³ Suara Pembaruan, Jum'at 24 Mei 2013, Advokat "Hitam" Mendominasi, Penegakan Hukum Hancur, hal. 6. (online) <http://www.franswinarta.com/>, (10 September 2013).

pelanggaran Kode Etik yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur. Salah satu contoh kasus pelanggaran Kode Etik yaitu sebagai berikut:⁴

SURYA Online, SURABAYA - Dinilai tak mampu menjaga rahasia dokumen pada mantan kliennya, Advokat senior, M Soka diberhentikan sementara sebagai Advokat selama setahun setelah menjalani sidang Dewan Kehormatan Daerah (DPD) Peradi Jatim yang dibacakan Ketua Majelis DPD Trimoejla D Soerjadi, Jumat (18/10/2013).

Kasus berawal ketika pengadu Bambang Suyendro, warga Jl Yos Sudarso 88 Kediri melaporkan Advokat M Soka yang berkantor di Jl Raya Jemur Andayani 50 Blok D Surabaya, tertanggal 15 Juli 2013.

2001, Bambang menunjuk Soka sebagai kuasa hukum untuk mengurus dan/atau menangani perkara penyelesaian aset bekas milik asing seluas 3.540 M2 bekas HGB Nomer 308 a.n Perkumpulan Hoo Hab Hoo Soe di Jl Yos Sudarso Kota Kediri.

2009, Bambang kembali berurusan dengan hukum dan kembali menunjuk Soka untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pada Lukito Prasajo terkait penyerobotan tanah. Soka diberi surat kuasa Bambang tertanggal 15 Mei 2009.

Bambang kembali mengajukan gugatan disertai tuntutan ganti rugi pada Lukito di PN Kota Kediri tentang penyerobotan tanah yang beda letak tapi masih satu objek, yakni Jl Yos Sudarso, pada 1 Desember 2011. Kemudian, Bambang memberi kuasa pada teradu yang menjadi Advokat sejak 2000 lalu, untuk membuat laporan polisi pada Lukito dan juga menyerahkan bukti berupa dokumen status kepemilikan rumah. Dari situ, Bambang memberi fee pada teradu sebesar Rp 163 juta.

Namun karena tak sesuai harapan pengadu, Bambang lalu mencabut surat kuasa teradu terkait permasalahan hukum dengan Lukito. "Seharusnya, setelah kuasa sebagai pengacara dicabut, teradu mengembalikan dokumen pengadu, atau setidaknya merahasiakan data pada dokumen. Ini adalah kode etik dan menyangkut moral," papar Trimoejla dalam sidang, Jumat (18/10/2013). Namun, teradu malah membuka semua data dari pengadu yang seharusnya dirahasiakan pengacara pada mantan kliennya, dengan menjadi saksi pada persidangan penyerobotan tanah. Keterangan teradu malah memberatkan pengadu dan menyatakan bahwa data yang dimiliki itu adalah dari hasil kerja dan investigasi teradu. "Ini melanggar Bab III pasal 4 huruf H tentang hubungan dengan klien, sehingga melanggar kode etik Advokat. Bahkan saat ini teradu juga menjadi kuasa hukum Lukito dalam perkara penyerobotan tanah," urainya.

Dari berkas putusan itu, majelis juga menyertakan keterangan teradu, yang intinya menolak dalil pengaduan pengadu kecuali yang diakui secara tegas oleh teradu. Kemudian, dari berkas yang dibacakan, teradu melanggar pasal 6 huruf d dan e UU No 18/2003 tentang Advokat serta pasal 2, pasal 3 huruf g dan pasal 4 huruf h KEAI. "Teradu diberhentikan sementara sebagai

⁴ Surya Online, Surabaya, M. Soka Diberhentikan Sementara, Jumat, 18 Oktober 2013 22:24 WIB <http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/18/m-soka-diberhentikan-sementara> diakses pada tanggal 26 Nopember 2013.

Advokat selama 12 bulan. Teradu diharuskan membayar biaya perkara Rp 3,5 juta," teranginya. Pada sidang itu, teradu M Soka tak hadir dalam sidang karena sedang ada di luar kota. Dalam sidang, Soka hanya diwakili pendamping Helmi Jauhari yang menuturkan bahwa pihaknya akan mengajukan banding atas putusan itu. "Namun untuk saat ini putusan ini akan kami beritahukan pada teradu dulu," pungkasnya.

Contoh kasus diatas terbukti melanggar Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat yang merumuskan bahwa "Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu". Ketentuan dalam Pasal 4 huruf h KEAI tentu berkaitan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai kewajiban seorang Advokat.

Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003 :

- 1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pemaparan latar belakang diatas perlu ditelaah secara lebih mengenai pelaksanaan kewajiban Advokat untuk menjaga rahasia klien. Mengenai kewajiban tersebut sudah diatur secara tertulis dalam Kode Etik Advokat maupun dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diketahui mengenai penerapan hukum yang berlaku dengan melihat fakta yang terjadi di kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Kantor Advokat Trimoejla D. Soerjadi dalam menjaga rahasia klien.

B. Masalah/Isu Hukum

1. Bagaimana implementasi kewajiban profesi oleh Advokat untuk menjaga rahasia klien?

2. Apa kendala dari Advokat dalam melaksanakan kewajiban profesi terkait menjaga rahasia klien?
3. Bagaimana penanganan oleh Dewan Kehormatan PERADI terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran mengenai kewajiban profesi Advokat untuk menjaga rahasia klien?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁵ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat atau melihat realitas hukum atau hukum dalam tindakan (*law in action*).⁶ Lokasi penelitian yang akan digunakan adalah kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, serta Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena terkait perkara yang pernah ditangani. Perkara yang pernah ditangani ada yang dimuat dalam media cetak, hal ini tentu berkaitan dengan kewajiban Advokat dalam menjaga rahasia klien.⁷ Serta terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh DKD PERADI Jatim terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran yang memang merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan PERADI.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yakni pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Advokat dalam menjaga rahasia klien. Serta pihak yang berhak untuk memberikan tindakan terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari Advokat yang berkantor di Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13.

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 137.

⁷ Hasil pra-survey yang dilakukan pada 27 September 2013 kepada Kantor Advokat Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners.

Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur, serta sekretaris dari Ketua DKD PERADI Jatim. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi internet. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Advokat dan seluruh pengurus perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁸ Sampel dalam penelitian ini adalah Advokat yang bekerja di Jonifianto & Partners, Lardi & Partners dan pengurus inti/utama Dewan Kehormatan PERADI Surabaya. Dari sampel yang ada, maka yang akan menjadi responden adalah lima orang Advokat yang bekerja di Jonifianto & Partners yaitu Eries Jonifianto, Kartidjo, Andika Wijaya, Buyung Ageng Islami, dan Wahyu Ongko Wiyono. Dua orang Advokat yang bekerja di Lardi & Partners, yaitu Lardi dan Wida Peace Ananta. Serta Ketua Dewan Kehormatan PERADI Jawa Timur yaitu Trimoelja D. Soerjadi dan Retno Handayani selaku sekretaris.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden maupun dari studi kepustakaan, nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari wawancara menurut kualitas dan kebenarannya.⁹ Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diketahui bagaimana implementasi Pasal 4 huruf h Kode Etik dan Pasal 19 Undang-undang Advokat terkait kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien. Definisi operasional dalam penulisan ini adalah (1) Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan Advokat terkait dengan kendala dan upaya dalam menjaga rahasia klien sesuai Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat jo. Pasal 19 Undang-undang Advokat; (2) Advokat adalah seseorang yang sudah

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *op.cit.*, hal. 106.

⁹ *Ibid*, hal. 167.

mendapatkan surat ijin praktek yang dikeluarkan oleh organisasi Advokat, Advokat yang dimaksud dalam penulisan ini adalah dari kantor Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, serta Advokat yang menjadi Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur; (3) Rahasia adalah segala informasi atau data baik tertulis atau tidak tertulis yang disampaikan klien terhadap Advokat; (4) Klien adalah seseorang yang membutuhkan dan menerima bantuan hukum dari seorang Advokat yang berkantor di Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners; dan (5) Kode Etik Profesi adalah kode etik yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya berperilaku dalam menjalankan profesi. Dari penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban dari masalah atau isu hukum yang menjadi tema artikel ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

a. Implementasi Advokat (di Kantor Advokat Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners) Dalam Menjaga Rahasia Klien

Kedua kantor yang bersangkutan memang pernah berbicara di depan media saat di wawancara oleh wartawan. Salah satu tim/partner dari kantor Jonifianto & Partners, yaitu Andika Wijaya pernah berbicara terkait dengan identitas kliennya dan sedikit menyinggung perkara yang ditangani.¹⁰ Menurut Andika Wijaya, pemaparan identitas dan perkara tersebut ke media bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi, sebab hal tersebut untuk pembelaan terhadap klien. Serta pemaparan identitas dan perkara tersebut tidak merugikan kepentingan klien.¹¹ Meskipun Andika Wijaya sudah berbicara di depan media terkait perkara yang ditangani, namun hal tersebut memang bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi terkait kewajiban menjaga rahasia klien. Hal tersebut merupakan kepentingan umum karena yang dihadapi adalah TNI Angkatan Laut yang merupakan pejabat pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Berbicara di depan media yang merupakan bagian dari pers merupakan cara yang efektif untuk mengungkapkan informasi, hal ini berhubungan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Andika Wijaya di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Andika Wijaya di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013.

dengan salah satu fungsi pers yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu sebagai sarana kontrol sosial. Hal ini juga diungkapkan oleh Advokat Trimoeja D. Soerjadi yang merupakan Advokat yang menangani perkara dalam kasus Marsinah yang juga berhadapan dengan angkatan militer. Perkara tersebut merupakan perkara yang menarik perhatian dunia dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga pada saat itu Trimoeja D. Soerjadi menggunakan media sebagai cara yang efektif untuk mengungkap kebenaran dan ini juga ditujukan untuk melindungi kepentingan klien.¹² Sedangkan kantor Lardi & Partners juga pernah mengungkapkan terkait perkara yang ditangani.¹³ Namun, pengungkapan tersebut atas permintaan kliennya sehingga bukan lagi menjadi rahasia sebab dengan permintaan dan persetujuan dari klien sendiri.

Berkaitan dengan implementasi kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien, hal ini erat hubungannya dengan penegakan hukum. Penegak hukum mempunyai beban tanggungjawab untuk mengimplementasikan/melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik. Hal ini dengan tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka harus memulihkan kode etik yang dilanggar tersebut supaya dapat ditegakkan kembali. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Lawrence M. Friedman terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Ketiga faktor tersebut adalah substansi, struktur, dan budaya hukum (*culture*). Substansi dalam hal ini adalah ketentuan terkait dengan rahasia klien yang terdapat dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat dan Pasal 19 Undang-undang Advokat. Struktur adalah Advokat yang menjadi tim/partners di Kantor Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners. Sedangkan budaya hukum yang dimaksud

¹² Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeja D. Soerjadi, pada tanggal 20 Nopember 2013.

¹³ Indonesia News, Edisi 235, 1-15 Nopember 2013, Hardi Berhasil Sita Aset Ratusan Milyard, hal. 2 & 3.

disini adalah sikap Advokat terhadap ketentuan terkait kewajiban menjaga rahasia klien. Menurut Bagir Manan, untuk melakukan perbaikan dalam penegakan hukum, cara yang paling tepat adalah dimulai dari sistem itu sendiri secara keseluruhan.¹⁴ Sistem merupakan komponen-komponen secara keseluruhan yang saling berhubungan dan bersifat timbal balik. Hal ini selaras dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Maka untuk memperbaiki penegakan hukum yang perlu dilakukan adalah perbaikan keseluruhan dari ketiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, Advokat yang berkantor di Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku. Secara substansi, memang sudah tercantum dalam Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat. Meskipun terkait dengan batasan dan ruang lingkup rahasia klien tidak ada penjelasan secara jelas. Sehingga Advokat membuat penafsiran sendiri terkait dengan rahasia klien. Namun, Advokat yang dalam hal ini adalah menjadi struktur yang menjadi dari bagian penegak hukum sudah melaksanakan ketentuan tersebut. Meskipun juga dipengaruhi oleh budaya hukum dalam arti sikap, pemikiran dan kepercayaannya terhadap hukum dan sistem hukum. Namun, hal utama yang mempengaruhi pelaksanaan dari kewajiban menjaga rahasia klien adalah Advokat itu sendiri. Sebab sebagai penerima kuasa dari klien mempunyai hak penuh atas informasi yang diberikan klien terhadap Advokat. Pengungkapan rahasia atau tidak mengungkap rahasia itu tergantung dari Advokat, meskipun tidak ada ketentuan yang terdapat dalam KEAI maupun Undang-undang Advokat dan hanya mengetahui pemahaman terkait ruang lingkup informasi dari klien pengungkapan rahasia yang sifatnya pelanggaran tidak akan terjadi.

¹⁴ Abdul Wahid dan Muh. Muhiddin, 2009, Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia, Bayu Media, Malang, hal. 151.

b. Kendala Advokat (di Kantor Advokat Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners) Dalam Menjaga Rahasia Klien

1. Kantor Advokat Jonifianto & Partners

Kendala penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi manusia terhadap hukum adalah jiwa orang itu sendiri. Sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang timbul dari luar diri manusia.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Advokat, baik Advokat senior dan Advokat muda di Kantor yang bersangkutan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi. Namun, kendala tersebut terletak pada Klien dengan tidak bisa menjaga dan membatasi informasi yang diberikan kepada pihak-pihak lain. Kendala ini merupakan kendala eksternal yaitu kendala yang timbul di luar diri Advokat itu sendiri. Selama ini sering klien kurang berhati-hati atau keceplosan terhadap pihak lain. Misalnya saja, karena seorang klien tidak bisa membatasi diri maka memberitahukan kepada pihak lawan upaya yang akan ditempuh (melakukan pemblokiran rekening pihak lawan). Tentu hal ini akan merugikan klien sendiri, sebab dengan pihak lawan mengetahui upaya yang akan dilakukan klien tersebut maka pihak lawan akan mengantisipasi pemblokiran rekening tersebut dengan mengalihkan tabungan yang ada di rekening tersebut.

2. Kantor Advokat Lardi & Partners

Sama halnya dengan kantor Jonifianto & Partners bahwa informasi kepada pihak lain keluar dari klien sendiri. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Advokat Lardi & Partners adalah kendala eksternal. Kendala tersebut adalah pada saat menunggu giliran sidang di Pengadilan ada rekan sesama Advokat dan Klien yang ingin membaca berkas-berkas. Karena ada perasaan tidak enak maka Advokat yang bersangkutan akhirnya meminjamkan berkas-berkas tersebut untuk dibaca oleh rekan sesama Advokat. Selain itu, yang menjadi kendala

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hal. 62 dan 63.

adalah adanya tekanan-tekanan dari pihak lawan. Misalnya saja, ada pihak lawan yang dengan sengaja mendekati untuk mendapatkan informasi secara terus-menerus sehingga membuat tidak nyaman dan tertekan.¹⁶ Kendala eksternal ini diakui mempengaruhi Advokat dalam menjaga rahasia klien, sehingga kendala eksternal ini juga perlu diperhatikan oleh setiap Advokat.

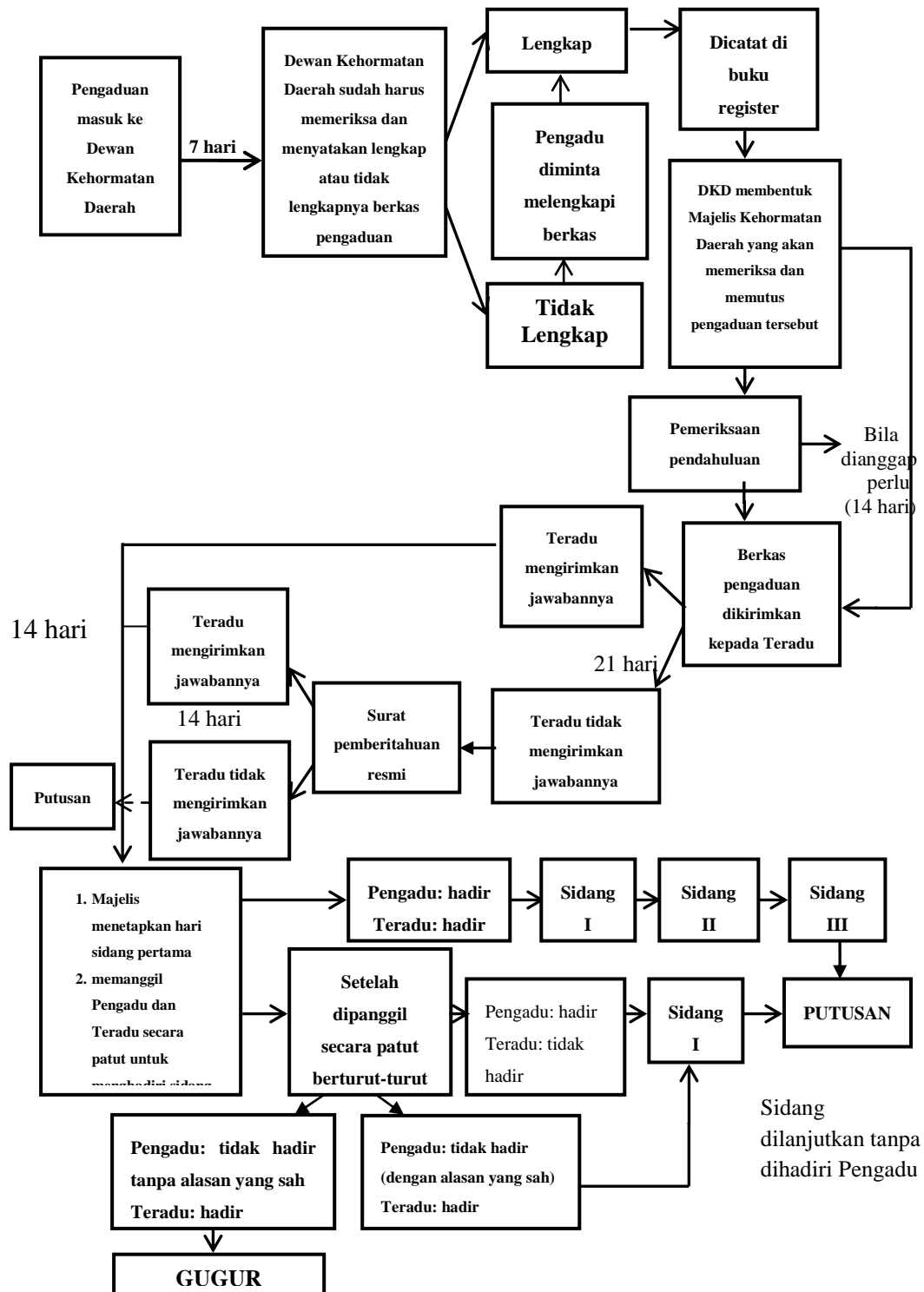
Dengan demikian, diperlukan adanya pembinaan terhadap diri Advokat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam rangka penegakan hukum, dalam hal ini adalah Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat. Sebab, yang menjadikan hal tersebut sebagai kendala adalah Advokat itu sendiri sehingga yang perlu diperbaiki adalah Advokat. Cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang berasal dari pihak lawan adalah membatasi tutur kata dalam berbicara dan bersikap. Serta menanamkan terhadap diri sendiri bahwa selalu berpedoman berdasarkan KEAI. Sedangkan untuk mengatasi kendala yang berasal dari klien maka Advokat harus memberikan pemahaman kepada Kliennya terkait hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila rahasia dibuka ke publik justru yang akan dirugikan adalah klien itu sendiri. Sehingga dengan memberikan pemahaman dari awal tentu bisa membuat klien mengerti dan pasti klien juga takut menerima kerugian atas perbuatannya sendiri.

c. Penanganan Oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur Terhadap Advokat yang Melanggar Kewajiban Menjaga Rahasia Klien

Dalam proses penanganan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat diawali dengan Pengaduan dan dilanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikut ini adalah bagan proses penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat:

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Lardi, Agus, Fafan, serta Ibu Wida Peace Ananta, di Kantor Lardi & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013.

Bagan 1
Penanganan Perkara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat



Sumber: data sekunder, diolah, 2014

Penjelasan dari bagan diatas adalah sebagai berikut:

Penanganan oleh Dewan Kehormatan PERADI Jatim terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran mengenai kewajiban Advokat dalam menjaga rahasia klien bertumpu pada adanya pengaduan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas aduan, setelah lengkap maka akan ada pemberitahuan dan penyampaian berkas aduan kepada Teradu. Teradu diberikan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk menyampaikan jawaban atas aduan atau replik yang dilakukan diluar persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan yang terdiri dari penyampaian alasan-alasan Pengadu dan pembelaan dari Teradu, serta pemeriksaan alat bukti, saksi dan saksi ahli. Pengadu dan Teradu diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan diluar persidangan. Selanjutnya DKD PERADI Jatim akan memberitahukan jadwal sidang pembacaan putusan kepada Pengadu dan Teradu. Pembacaan putusan dilaksanakan, keputusan dapat berupa:

- a) Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;
- b) Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta memberikan sanksi-sanksi kepada Teradu.
- c) Menolak pengaduan dari Pengadu.

D. Penutup

a. Kesimpulan

1. Implementasi Kewajiban oleh Advokat dalam menjaga rahasia klien dari Kantor Advokat Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners sudah menerapkan ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.
2. Kendala yang dihadapi Advokat dalam menjaga rahasia klien adalah sebagai berikut:
 - a) Kantor Advokat Jonifianto & Partners
Terdapat kendala eksternal yaitu terletak pada klien dari Kantor Jonifianto & Partners yang tidak bisa menjaga dan membatasi informasi yang dibicarakan ke publik.
 - b) Kantor Advokat Lardi & Partners

Sama dengan kantor Jonifianto & Partners, yaitu kendala eksternal bahwa informasi keluar ke pihak lain karena klien sendiri. Selain itu, ada perasaan tidak enak untuk menolak apabila pada saat menunggu sidang di pengadilan ada rekan atau klien yang ingin membaca berkas dan adanya tekanan-tekanan dari pihak lawan.

b. Saran

1. Bagi Kantor Advokat Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners adalah:
 - 1) Sebaiknya bisa mengevaluasi diri sendiri supaya dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menjaga rahasia klien.
 - 2) Sebaiknya awal pengikatan kerjasama dengan klien bisa memberikan pemahaman kepada klien agar membatasi dan menjaga pemberian informasi ke publik. Sebab hal ini menyangkut kepentingan dari klien itu sendiri.
2. Bagi Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jatim adalah:
 - 1) Sebaiknya merevisi keputusan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan saksi, sebab tidak ada ketentuan yang secara jelas dan tegas siapa saja yang berhak menjadi saksi.
 - 2) Sebaiknya lebih meningkatkan kinerja tugas dalam melakukan sosialisasi terkait dengan Kode Etik.
 - 3) Sebaiknya jika ada musyawarah nasional, diselenggarakan untuk membentuk atau mendirikan kantor PERADI yang di dalamnya terdapat Dewan Kehormatan dari uang iuran sukarela dari para Advokat.
3. Bagi Advokat:
 - 1) Sebaiknya mengevaluasi diri agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Kode Etik Advokat dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - 2) Sebaiknya lebih meningkatkan pemahaman terhadap Kode Etik Advokat, sebab Kode Etik Advokat merupakan pedoman seorang Advokat.

4. Bagi Masyarakat:

- 1) Sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban Advokat, sehingga apabila menjadi klien dapat mengantisipasi jika ada Advokat yang melakukan penyimpangan terkait hak dan kewajiban tersebut.
- 2) Sebaiknya masyarakat khususnya seorang klien yang merasa dirugikan atas perbuatan Advokat yang menyimpang segera mengadukan hal tersebut kepada DKD PERADI Jatim.

E. Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Ghofur Anshori, **Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

Abdul Wahid dan Muh. Muhiddin, **Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia**, Bayu Media, Malang, 2009.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo, **Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Peradaban, 2007.

Artikel:

Indonesia News, Edisi 235, 1-15 Nopember 2013, **Hardi Berhasil Sita Aset Ratusan Milyard**, hal. 2 & 3.

Internet:

Suara Pembaruan, Jum'at 24 Mei 2013, Advokat "Hitam" Mendominasi, Penegakan Hukum Hancur, (*online*), <http://www.franswinarta.com/>

Surya Online, Surabaya, M. Soka Diberhentikan Sementara, Jumat, 18 Oktober 2013 22:24 WIB <http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/18/m-soka-diberhentikan-sementara>.

[www.peradi.or.id/admin/download.php?docid=dd0cfea077f6847aa06091f6d9e
bcb88](http://www.peradi.or.id/admin/download.php?docid=dd0cfea077f6847aa06091f6d9ebcb88)